



# LAPORAN KINERJA (LKJ) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024



**PEMERINTAH PESISIR SELATAN**

**Painan, 6 JANUARI 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: [Inspektoratpessel@yahoo.co.id](mailto:Inspektoratpessel@yahoo.co.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA (LKj)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 26 Februari 2025  
Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780528 200501 2 004

## KATA PENGANTAR



**P**uji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana Laporan kinerja ini disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kami mengharapkan adanya informasi-informasi berupa saran dan masukan, koreksi serta kritikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang.



Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan. Di harapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhir kata semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan Kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.

Painan, 6 Januari 2025

  
**KEPALA PELAKSANA**  
**YUSKARDI, SST, MT**  
NIP. 19700128 199903 1 004



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah laporan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Visi dan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJM sebagai berikut :

**Visi : "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional"**

**Misi : "Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenram dan Dinamis"** misi ke-6 RPJMD

Berdasarkan visi dan misi Perangkat Daerah, telah ditetapkan tujuan, indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menunjang visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Dalam menunjang Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan 2 Sasaran Strategis dan 3 indikator kinerja Esselon II.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2024.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (Dua) Sasaran Strategis dan 3 (Tiga) indikator kinerja yang berpedoman pada Misi 2 RPMJD sebesar **85,25%**. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada table berikut:

### Tabel Capaian



## Indikator Kinerja Persasaran,

N O	Sasaran Strategis (Sasaran Kepala OPD)	Indikator Kinerja ESS.II	Satuan	Target 2023	Realisa si	Capaian
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	1 Nilai Akip Perangkat Daerah	Persenta se	A (87,5)	BB (75,72)	86,19%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1 Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	Nagari	15	7	46,66%
		2 Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	Nagari	2	6	300%
		3 Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama	Nagari	5	3	60%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1 Nilai Kematangan Inovasi OPD	Persenta se	100%	89%	89%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>						<b>113,37</b>



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUT.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud Tujuan.....	I-2
1.3 Dasar Hukum.....	I-3
1.4 Strukur Organisasi.....	I-4
1.6 Kepegawaian.....	I-9
1.7 Sistematika Penyusunan.....	I-10
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	
2.1 Rencana Strategis.....	II-1
2.1.1 Visi.....	II-1
2.1.2 Misi.....	II-1
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran.....	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja.....	II-2
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	II-3
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	
3.1. Metodologi Penilaian Kinerja .....	III-1
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-2
3.3. Capaian Kinerja.....	III-4
3.4. Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.....	III-7
3.5. Akuntabilitas Keuangan .....	III-13
BAB IV	
PENUTUP.....	
4.1. Kesimpulan.....	IV-1
4.2. Saran.....	IV-2



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan kinerja tahun pertama dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun LKJIP, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan Kinerja dan pemenuhan prinsip akuntabilitas. LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil -hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2024.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah bentuk pertanggung jawaban tahunan Organisasi Perangkat Daerah kepada Pemerintah dan stakeholder atas pencapaian kinerja serta visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal- hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.



### 1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

#### 1.4. GAMBARAN UMUM OPD

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Yang Selanjutnya Disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah di kabupaten pesisir selatan.
3. Kepala adalah Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan yang di jabat secara ex-officio oleh seorang sekretaris Daerah Kabuapten Pesisir Selatan.
4. Unsur Pengarah adalah instansi yang terkait sebagai tenaga profesional berdasarkan bidang urusannya di lingkup BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Bencana adalah peristiwa atau Rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan atau factor non alam maupun factor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Menjalankan Fungsi:
  1. Koordinasi Penaggulangan Bencana
  2. Komando Penanggulangan Bencana
  3. Pelaksana Penanggulangan Bencana

#### 1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana daerah dibidang Penanggulangan Bencana dibawah tanggung jawab Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah,



yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon II) sebagai mana tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diubah dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 .Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penangulangan Bencana Daerah dengan Penambahan Bidang Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua) seksi yaitu Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran dan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran . Pada Tahun 2016 Terjadi Perubahan Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 maka 1 (satu ) Bidang Pemadam Kebakaran tidak berada dalam Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimulai Tahun 2017.

Fungsi Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.



Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri Dari :

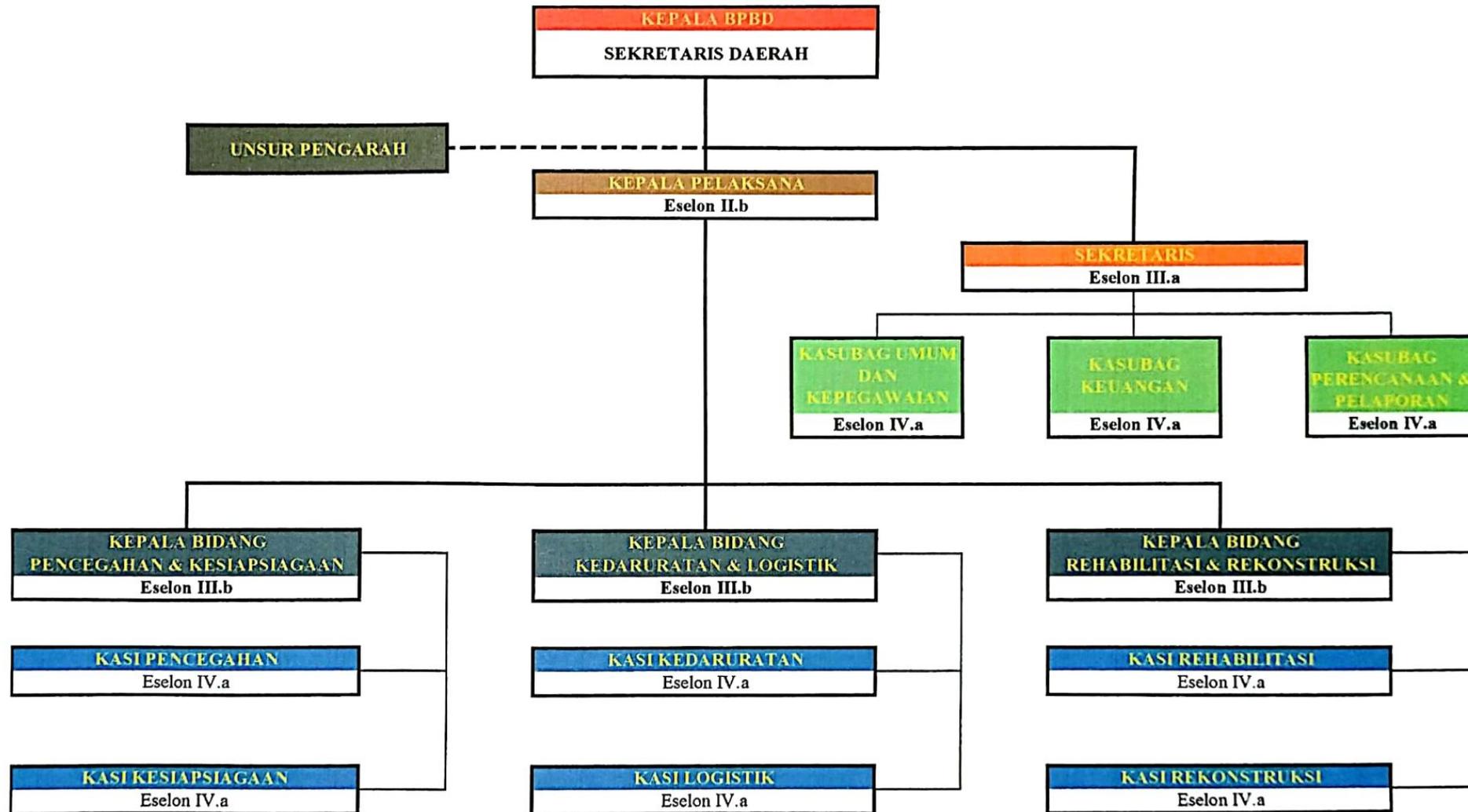
1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
  - a. Seksi Pencegahan.
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
  - a. Seksi Kedaruratan
  - b. Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
  - a. Seksi Rehabilitasi.
  - b. Seksi Rekonstruksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BPBD  
KABUPATEN PESIR SELATAN  
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014





### 1.6. KEPEGAWAIAN

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 89 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Sukarela. Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah yang Pegawai dimiliki oleh BPBDB Kabupaten Pesisir Selatan ( per 31 Desember 2024)

GOLONGAN	ESSELON				Staf	Total
	II.b	III.a	III. b	IV.a		
Golongan : IV / d	0	0	0	0	0	0
Golongan : IV / c	0	0	0	0	0	0
Golongan : IV / b	1	0	0	0	1	2
Golongan : IV / a	0	0	2	0	0	2
Golongan : III/ d	0	1	1	0	2	4
Golongan : III/ c	0	0	0	5	2	7
Golongan : III/ b	0	0	0	0	3	3
Golongan : III/ a	0	0	0	0	2	2
Golongan : II / d	0	0	0	0	0	0
Golongan : II / c	0	0	0	0	2	2
Golongan : II / b	0	0	0	0	0	0
Golongan : II / a	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah PNS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
Tenaga Sukarela S1	0	0	0	0	17	17
Tenaga Sukarela DIII	0	0	0	0	1	1
Tenaga Sukarela SMA	0	0	0	0	49	49
<b>Jumlah Tenaga Sukarela</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>79</b>	<b>89</b>



## 1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Organisasi, maksud dan tujuan, dasar hukum dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
  - a. **Capaian Kinerja**  
Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, evaluasi dan analisis capaian kinerja
  - b. **Realisasi Anggaran**  
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja.
4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja tahun 2024 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

##### 2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholders*). Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tergambar dalam suatu bentuk. Untuk mencapai masa depan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dan mengacu pada Visi Bupati Pesisir Selatan yaitu:

**"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermataabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional"**

Visi tersebut di atas memberikan pengertian mengenai kondisi masyarakat di masa depan yang menggambarkan tujuan dan sasaran Strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, Dunia usaha dan masyarakat pada umumnya

##### 2.1.2. Misi

Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJM sebagai berikut :

**"Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenram dan Dinamis"**  
misi ke-6 RPJMD.

##### 2.1.3. Tujuan

Tujuan dari Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJM sebagai berikut :



## “Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis”

### 2.1.4. Sasaran

Sasaran yaitu “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri”.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 :

NO	SASARAN (Sasaran Kepala OPD)	INDIKATOR KINERJA ESS.II		TARGET 2024
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Bekinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (87,5)
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan secara Mandiri	1	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	15
		2	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	2
		3	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama	5
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1	Nilai Kematangan Inovasi PD	100%

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 berdasarkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perjanjian Kinerja tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak di capai Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2024.

## Penjelasan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder pembangunan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Pemerintah daerah Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Pemerintah daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

### Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Level dalam RPJMD :	Indikator Sasaran
Defenisi Operasional :	Indikator jumlah nagari tangguh bencana adalah untuk melihat banyaknya nagari yang telah memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
Formulasi :	Jumlah nagari yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana
Sumber data :	BPBD
Penanggung Jawab :	DPMDP2KB, BPBD

### 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	OUTLOK	TARGET SETIAP TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ke -52 RPJMD	Jumlah Nagari Tangguh bencana	Nagari	Pratama (182)	Pratama (182)	Pratama (51)	Pratama (15)	Pratama (12)	Pratama (17)
			Madya (0)	Madya (0)	Madya (2)	Madya (2)	Madya (6)	Madya (8)
			Utama (0)	Utama (0)	Utama (5)	Utama (5)	Utama (5)	Utama (8)



### Faktor Keberhasilan:

1. Pendekatan Langsung Ke Nagari-Nagari Untuk Pembinaan KSB
2. Menyediakan Dana Sosialisasi Tentang Nagari Tangguh dari APBD
3. Pendekatan Dengan OPD Terkait dan Penyaluran Program Mitigasi Bencana
4. Menggandeng Swasta Untuk Dapat Berpartisipasi Dalam Mitigasi Bencana di Nagari

Indikator nagari tangguh bencana adalah kemampuan nagari untuk menghadapi ancaman bencana, beradaptasi, dan memulihkan diri. Indikator ini dapat berupa kebijakan, rencana, dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.

Berikut adalah beberapa indikator nagari tangguh bencana:

- Kebijakan dan peraturan terkait bencana
- Rencana penanggulangan bencana
- Rencana aksi komunitas
- Forum penanganan bencana
- Tim relawan bencana
- Peta dan kajian risiko
- Peta jalur evakuasi dan tempat pengungsian
- Sistem peringatan dini
- Pelatihan untuk pemerintah, relawan, dan warga
- Pelibatan masyarakat

Nagari tangguh bencana dapat diukur melalui penilaian mandiri. Hasil penilaian mandiri ini dapat mengelompokkan nagari menjadi tangguh bencana pratama, madya, atau utama.

Indikator ini Ditunjang Oleh Program Penanggulangan Bencana Dengan Target Anggaran Rp.1.737.362.705,- dan Realisasi Sebesar Rp.1.682.691.597,- Atau Capaian 96,85% Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.



2024

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.180.907.689
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.737.367.705

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja.

#### 3.1. METODOLOGI PENILAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



### 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS (Sasaran Kepala OPD)	INDIKATOR KINERJA ESS.II	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Bekinerja	1 Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (87,5)	BB ( 75,72)	86,19%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1 Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	15	7	46,66%
		2 Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	2	6	300%
		3 Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama	5	3	60%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1 Nilai Kematangan Inovasi OPD	100%	89%	89%



Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

- 1) Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Bekinerja
  - ❖ Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target A (87,5). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah BB (75,72) atau sebesar 86,19% dengan predikat **baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nilai Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini memakai nilai evaluasi tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh pada bulan maret tahun 2025.
- 2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri
  - a) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama dengan target 15 nagari tercapai 7 nagari pratama yaitu
    - ✓ Nagari Sei Nyalo Mudiak Aie
    - ✓ Ganting Mudik Selatan
    - ✓ Langkitan
    - ✓ Nagari Durian Seribu
    - ✓ Duku Utara
    - ✓ Barung- Barung Belantai Tengah
    - ✓ Pulau KaramNagari Pratama dibentuk dengan murni dana Nagari
  - b) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya dengan Target 15 Tercapai 6 Nagari, 3 Nagari Pratama yang menjadi madya oleh Dana Jamari Sakato Yaitu
    1. Nagari Duku
    2. Nagari Duku Utara
    3. Nagari Barung-Barung Belantai TengahTarget tahun 2024 nagari tangguh madya 2 nagari tercapai 6 nagari dikarenakan bantuan Dana dari Jamari Sakato dan Dana M60 IDRIP BNPB..
  - c) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama dari target 5 tercapai 3 nagari yang di Danai Oleh Dana IDRIP BNPB Yaitu :
    1. Nagari Ampang Pulai
    2. Nagari Painan Selatan
    3. Nagari Amping Parak

3) Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah

- ❖ Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target 100,00. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 89,00 atau sebesar 89,00% dengan predikat **sangat baik**.

Capaian Rata- Rata ke 3 (Tiga) Indikator Kinerja tersebut diatas adalah 85,51%.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### b Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3  
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun  
2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tanpa Satuan	A (87,5)	BB (75,72)*	86,19%
Rata-rata capaian (%)						86,19%

Catatan : \*) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

#### c Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan  
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A (86,21)	BB (75,72)	A (87,5)*

Catatan : \*) Data Capaian Tahun 2023



Sumber : *Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025*

#### d Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A (87,5)*	AA (90,43)	96,66	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : \*) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : *Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025*

#### e Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6  
Perbandingan Nilai Sakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar	Kementerian Republik Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	A (87,5)*	BB (75,72)*	BB**

Catatan : \*) Data Capaian Tahun 2023

\*\*\*) Data Capaian Tahun 2022

Sumber : 1. Dinas Perkebunan, TP dan Hortikultura Prov. Sumbar  
2. <http://1data.menpan.go.id>

#### f Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

##### 1. Perencanaan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### 3.3. CAPAIAN KINERJA

#### A. Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS (Sasaran Kepala OPD)	INDIKATOR KINERJA ESS.II	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1 Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	85 %	71.01%	81.62%

#### a. Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana

NO	INDIKATOR KINERJA ESS.II	TARGET 2022	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN Tahun 2022	TARGET 2023	REALISASI Tahun 2023	CAPAIAN Tahun 2023
1.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75%	89,36%	119%	85%	109%	93,34%

Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah warga yang terlibat dalam kegiatan pra bencana. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan cara:

- ❖ Melakukan kegiatan penanggulangan bencana
- ❖ Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana
- ❖ Mengikuti pelatihan evakuasi dan simulasi bencana
- ❖ Membangun infrastruktur tahan bencana
- ❖ Membentuk tim tanggap bencana di tingkat desa atau kelurahan
- ❖ Menyusun rencana kontinjensi

Beberapa contoh kegiatan mitigasi bencana adalah: Membuat peta wilayah rawan bencana, Membangun bangunan tahan gempa, Menanam pohon bakau, Penghijauan hutan, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

a. Terwujudnya Penanganan Bencana Yang Profesional

NO	INDIKATOR KINERJA ESS.II	TARGET 2022	REALISASI Tahun 2022	CAPAIAN Tahun 2022	TARGET 2023	REALISASI Tahun 2023	CAPAIAN Tahun 2023
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	87%	71,01%	81,62%	85%	93,76 %	109%

Indikator warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang mendapatkan penanganan dan penyelamatan saat terjadi bencana.

Evakuasi korban bencana adalah kegiatan memindahkan korban bencana ke tempat yang aman. Tujuannya untuk melindungi nyawa manusia dan meminimalkan risiko cedera atau kerusakan akibat bencana.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana dengan: Mengikuti sosialisasi mitigasi bencana, Membangun infrastruktur tahan bencana, Mengikuti kegiatan simulasi evakuasi.

b. Terwujudnya Pelayanan Informasi di Daerah Rawan Bencana



NO	INDIKATOR KINERJA ESS.II.	TARGET 2020	REALISASI Tahun 2020	CAPAIAN Tahun 2020	TARGET 2021	REALISASI Tahun 2021	CAPAIAN Tahun 2021
3	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	-	-	-	-	-	-

#### Penjelasan Setiap Indikator dan Program Pendukung

1. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
2. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
  - KRB
  - Sosialisasi warga berupa langsung pamphlet dan media social (Youtube,instagram dan FB)
  - Program Pendukung: Banyaknya Terbentuk Nagari Tangguh Bencana
3. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Jumlah Waga Negara yang terselamatan akibat bencana

Program : penanggulangan bencana dengan kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

#### Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

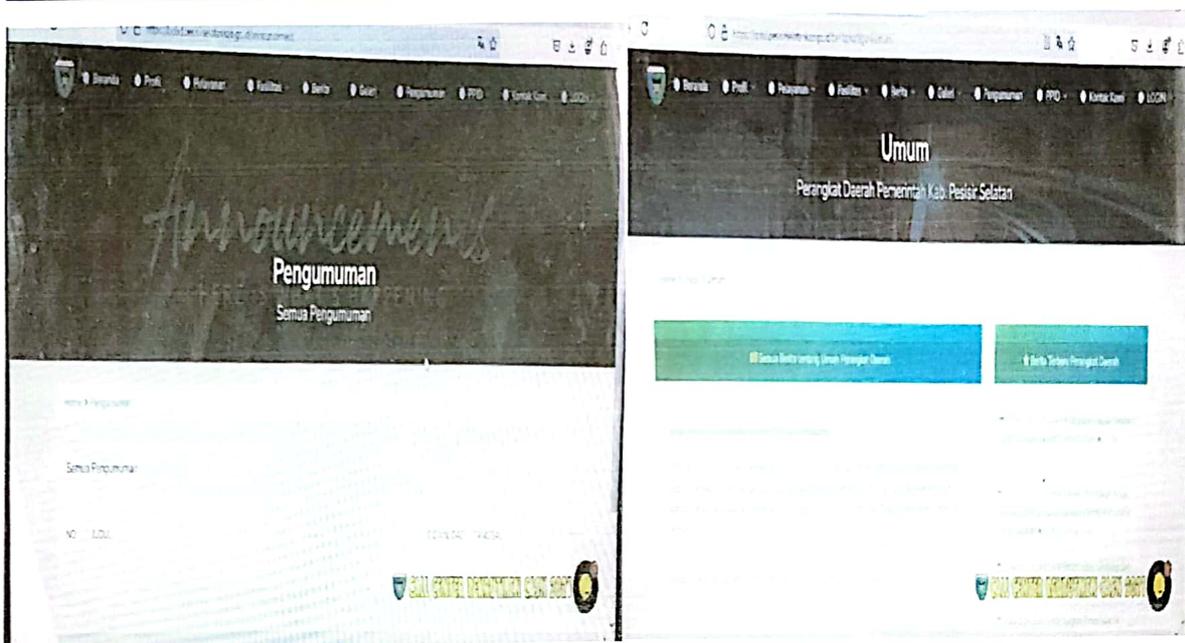
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

## 2. Perencanaan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- e. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- f. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- g. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- h. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://bpbdb.pesisirselatankab.go.id/#> dengan tampilan sebagai berikut :

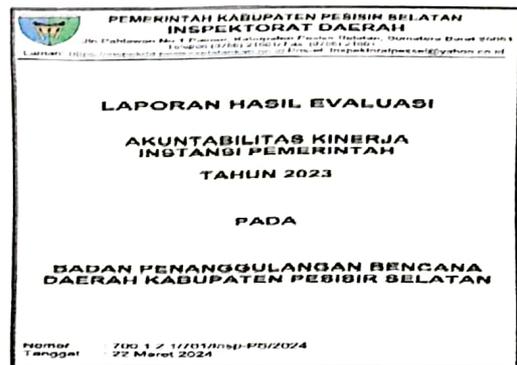


## 3. Pengukuran Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**.

#### 4. Pelaporan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan Cover Laporan Kinerja yang telah disusun serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



#### 5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat

monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar dibawah ini :



### g Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Catatan : \*) Data Capaian Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah badan penanggulangan bencana daerah	A (87,5)	BB (75,72)	86,19	4.180.907.689	3.846.437.010	92,00	

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :



$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 92,00%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah A (87,5), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sebesar BB (75,72) serta untuk capaian kinerja sebesar 94,84%. Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

- a) Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja di website badan penanggulangan bencana daerah.
- b) Agar membuat ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan yang memenuhi kriteria SMART dan Cukup pada Rencana Strategis (Renstra).
- c) Agar memaksimalkan upaya pencapaian kinerja tercapai lebih dari 90%
- d) Agar melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dengan membuat laporan/notulen terhadap hasil monitoring rencana aksi.

2) Pengukuran Kinerja

- a) Agar Membuat pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja berupa SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja.
- b) Agar melengkapi dokumen IKU dengan definisi operasional yang jelas dan cara mengukur indikator kinerja yang memadai, yaitu harus membuat informasi sebagai berikut :
  - Siapa
  - Sasaran yang akan dicapai
  - Indikator Kinerja
  - Formulasi Perhitungan/penjelasan dan
  - Sumber data



- c) Agar membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
- 3) Pelaporan Kinerja
- a) Agar memublikasikan laporan kinerja di website Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b) Agar Menyusun Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
  - c) Agar laporan kinerja memuat analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
  - d) Agar Laporan Kinerja memuat kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya dan/atau hambatannya.
  - e) Agar Laporan Kinerja memuat efisiensi atas penggunaan sumber daya (Orang, anggaran, mekanisme/SOP ) dalam mencapai kinerja.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Agar melakukan pemantauan Capaian Kinerja Inter dengan membuat Laporan Monev yang menyajikan informasi seluruh kriteria sebagai berikut
- Target Kinerja
  - Realisasi Kinerja
  - Faktor Pendorong
  - Faktor Hambatan
  - Rekomendasi (saran perbaikan)

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :



TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Rekomendasi	Revisi Aspek Tidak Lajut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Perencanaan Kinerja					
a	Agar memisahkan an dokumen perencanaan kinerja di website Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mempublikasikan ke Website IPD/BPBD	1 Tahun	Januari 2024 - Desember 2024	Bakruh Bidang	Dalam proses pelaksanaan
b	Agar membuat dokumen kebijakan (termasuk Kinerja) Tujuan Misi Rencana Strategis (Menera)	Menyusun dokumen kebijakan (termasuk Kinerja) Tujuan Misi Rencana Strategis (Menera)	2021-2026	Januari 2024 - Desember 2024	Bakruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan
c	Agar melakukan an survey pencapaian kinerja agar terdapat web dan SIP	Rapat Evaluasi Kinerja Berbasis dan Berkelanjutan secara Berkesinambungan	Per triwulan	Januari 2024 - Desember 2024	Bakruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan
d	Agar melakukan perbaikan/pengumpulan Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Kinerja yang dilampirkan dan perbaikan kinerja sebelumnya	Rapat Evaluasi Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Kinerja yang dilampirkan dan perbaikan kinerja sebelumnya	1 Tahun	Januari 2024 - Desember 2024	Bakruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan

perbaikan kinerja sebelumnya dan untuk menunjukkan keefektifan yang lebih baik dengan memuat laporan/monitoring hasil Monitoring Rencana Aksi						
II	Pengukuran Kinerja					
a	Agar membuat pedoman teknis pengukuran dan penumpulan data kinerja	Membuat Pedoman Teknik Pengukuran Untuk Pengumpulan Data Kinerja Berupa SOP	1 Tahun	Januari 2024 - Desember 2024	Bakruh Bidang	Dalam proses pelaksanaan
b	Agar membuat indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja yang menjadi yang harus dibuat secara sebagai berikut: 1. Rata-rata yang akan dicapai Indikator Kinerja; 2. Jumlah perbandingan/berlaku di sumber data	Rapat Evaluasi Kinerja yang Dapat Diandalkan	Per triwulan	Januari 2024 - Desember 2024	Bakruh Bidang	Dalam proses pelaksanaan
c	Agar membuat mekanisme yang akan digunakan penumpulan data kinerja yang dapat diandalkan sebagai berikut: 1. Tersedia pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan 2. Ada kerangka untuk mengukur sumber data kinerja yang terdapat penanggung jawab yang jelas					

d. Tersedia SOP yang jelas (juga terdapat pedoman teknis)						
a	Agar melakukan an survey pencapaian kinerja agar terdapat web dan SIP	Rapat Evaluasi Kinerja Berbasis dan Berkelanjutan secara Berkesinambungan	1 Tahun	Januari 2024 - Desember 2024	Bakruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan
III	Pelaporan Kinerja					
a	Agar melakukan an survey pencapaian kinerja agar terdapat web dan SIP	Rapat Evaluasi Kinerja Berbasis dan Berkelanjutan secara Berkesinambungan	1 Tahun	Januari 2024 - Desember 2024	Bakruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan
b	Agar melakukan an survey pencapaian kinerja agar terdapat web dan SIP	Rapat Evaluasi Kinerja Berbasis dan Berkelanjutan secara Berkesinambungan	Per triwulan	Januari 2024 - Desember 2024	Bakruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan
c	Agar melakukan an survey pencapaian kinerja agar terdapat web dan SIP	Rapat Evaluasi Kinerja Berbasis dan Berkelanjutan secara Berkesinambungan	Per triwulan	Januari 2024 - Desember 2024	Bakruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan
d	Agar melakukan an survey pencapaian kinerja agar terdapat web dan SIP	Rapat Evaluasi Kinerja Berbasis dan Berkelanjutan secara Berkesinambungan	Per triwulan	Januari 2024 - Desember 2024	Bakruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan

Agar Laporan Kinerja memuat elemen atau penggunaan sumber daya (orang, anggaran, mekanisme/SOP) dalam mencapai kinerja	Rapat Evaluasi Setiap Bulan	Per Bulan	Januari 2024 - Desember 2024	Seluruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan	
IV	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
a	Agar melakukan pemantauan Cpain Kinerja Internal dengan membuat Laporan Maner yang menyajikan informasi seluruh kriteria sebagai berikut: 1. Target Kinerja 2. Realisasi Kinerja 3. Faktor Pendorong 4. Faktor Hambatan 5. Rekomendasi (Saran Perbaikan)	Rapat Evaluasi Target Kinerja Realisasi Kinerja Untuk Cpain Laporan Maner	Per triwulan	Januari 2024 - Desember 2024	Seluruh Bidang	Dalam Proses Pelaksanaan

### h Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;



- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
  - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :  
Sub Kegiatan :
  - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp.4.180.907.689 atau 92% dari total anggaran sebesar Rp. 3.846.745.413, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 8%.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri terdiri atas 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu

1. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama
2. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya
3. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3  
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun  
2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	Nagari	15	7	46,66%
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	Nagari	2	6	300%
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	Nagari	5	3	60%
<b>Rata-rata capaian (%)</b>						<b>135%</b>



Catatan : \*) Data Capaian Tahun 2024  
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

### Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

a) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama dengan target 15 nagari tercapai 7 nagari pratama yaitu

- ✓ Nagari Sei Nyalo Mudiak Aie
- ✓ Ganting Mudik Selatan
- ✓ Langkitan
- ✓ Nagari Durian Seribu
- ✓ Duku Utara
- ✓ Barung- Barung Belantai Tengah
- ✓ Pulau Karam

Nagari Pratama dibentuk dengan murni dana Nagari

b) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya dengan Target 15 Tercapai 6 Nagari, 3 Nagari Pratama yang menjadi madya oleh Dana Jamari Sakato Yaitu

4. Nagari Duku
5. Nagari Duku Utara
6. Nagari Barung-Barung Belantai Tengah

Target tahun 2024 nagari tangguh madya 2 nagari tercapai 6 nagari dikarenakan bantuan Dana dari Jamari Sakato dan Dana M60 IDRIP BNPB..

c) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama dari target 5 tercapai 3 nagari yang di Danai Oleh Dana IDRIP BNPB Yaitu :

4. Nagari Ampang Pulai
5. Nagari Painan Selatan
6. Nagari Amping Parak

### b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan  
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	182	51	7
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	0	2	6
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	0	5	3

Catatan : \*) Data Capaian Tahun 2022

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

**c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan capaian indikator kinerja NKinerja Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen  
Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	7	17	41,17	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	6	8	75	



	Jumlah Nagari Tangguh Utama	3	8	37,5	
--	-----------------------------	---	---	------	--

Catatan : \*) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

#### d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

Target Indikator Kinerja nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri didukung dari dana Idris BNPB dan Jamari Sakato.

- a) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama dengan target 15 nagari tercapai 7 nagari pratama yaitu

- ✓ Nagari Sei Nyalo Mudiak Aie
- ✓ Ganting Mudik Selatan
- ✓ Langkitan
- ✓ Nagari Durian Seribu
- ✓ Duku Utara
- ✓ Barung- Barung Belantai Tengah
- ✓ Pulau Karam

Nagari Pratama dibentuk dengan murni dana Nagari

- b) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya dengan Target 15 Tercapai 6 Nagari, 3 Nagari Pratama yang menjadi madya oleh Dana Jamari Sakato Yaitu

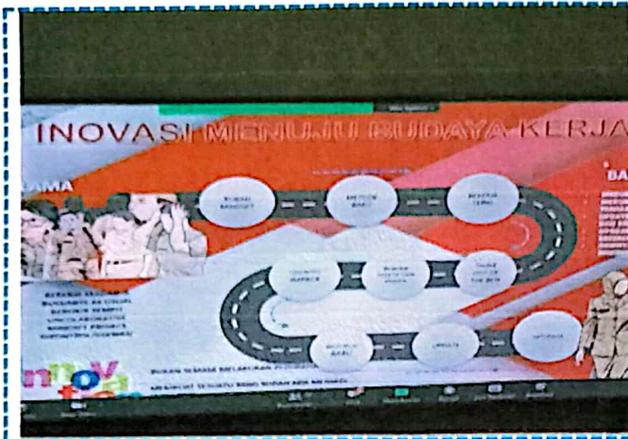
7. Nagari Duku
8. Nagari Duku Utara
9. Nagari Barung-Barung Belantai Tengah

Target tahun 2024 nagari tangguh madya 2 nagari tercapai 6 nagari dikarenakan bantuan Dana dari Jamari Sakato dan Dana M60 IDRIP BNPB..

- c) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama dari target 5 tercapai 3 nagari yang di Danai Oleh Dana IDRIP BNPB Yaitu :

7. Nagari Ampang Pulau
8. Nagari Painan Selatan
9. Nagari Amping Parak

Faktor Kegagalannya Karena Kurangnya Anggaran Pendukung indikator kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri



### SASARAN STRATEGIS 3 **Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### a. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	41,00	89,00

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024.

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 48% dari 41,00 pada Tahun 2023 menjadi 89,00 pada Tahun 2024.

**b. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89,00	100,00	89,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

**c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel  
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tanpa Satuan	100,00	89,00	89,00	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikarenakan masih bersifat manual/ konvensional, belum terintegrasi, kemanfaatan inovasi hanya terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

#### e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,00	89,00	89,00	1.737.362.405	1.682.691.597	96,85	

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen Inovasi; dan
4. Keberlanjutan Inovasi.



TABEL. URUSAN WAJIB ANGGARAN TAHUN 2024

No	URUSAN WAJIB DAN/PROGRAM/KEGIATAN		BELANJA (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	%
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5.918.275.394	5.529.437.010	93,42
I	(01)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.180.907.689	3.846.745.413	92,00
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.583.885	41.613.350	93,33
2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.249.275.394	2.998.980.456	92,29
3	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	205.960.000	174.524.688	84,73
3	03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.356.260	2.340.889	99,34
4	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.452.021	4.423.000	99,34
5	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.270.767	30.188.100	99,72
6	06	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.740.235	26.026.000	97,32
7	07	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.925.000	1.815.000	94,28
8	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.726.000	236.887.394	95,24
9	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.400.000	58.207.586	93,28



10	10	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	36.889.000	94,12
11	11	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.628.147	224.895.950	90,45
II	(02)	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.737.367.705</b>	<b>1.682.691.597</b>	<b>96,85</b>
12	01	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	98.071.150	97.330.389	99,24
13	01	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	56.674.745	56.388.500	100
14	01	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	122.425.695	121.981.050	99,63
15	01	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kcamatan/Kota	1.191.553.301	1.174.288.280	98,55
16	02	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	94.290.110	79.732.950	84,56
17	03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	72.927.007	56.293.805	77,19
18	04	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	101.425.697	96.716.623	95,35

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :



1. Plafon anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 5.918.275.394,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.529.437.010,- atau sebesar 93,42%.
2. Selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan kegiatan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.918.275.394 atau sebesar 93,43%.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Capaian Sasaran

Dari 3 (sebelas) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 89,5%, dengan nilai tertinggi adalah 100% yaitu sasaran "Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana". Untuk nilai terendah adalah 72,5% yaitu sasaran "Pemulihan Daerah Terdampak Bencana".

#### 2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja berhasil mencapai target dan 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 85,25%, dengan nilai tertinggi adalah 100% yaitu indikator kinerja "Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana", sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 60% yaitu indikator kinerja "Persentase Terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana".

#### 3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.5.918.275.394,- terealisasi sebesar Rp.5.529.437.010,- atau 93,42%. Dari 20 (dua puluh ) sub-kegiatan, capaian anggaran belanja tertinggi adalah sub-kegiatan "Penanganan Pasca Bencana" dan sub-kegiatan "Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana" yaitu 100% dan terendah adalah sub-kegiatan "Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor" yaitu 11%.Pencapaian yang sangat



rendah ini disebabkan pada perubahan anggaran tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program sehingga dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



CAPAIAN KINERJA TRIVULAN LULUH, IV TAHUN 2024  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESIR SELATAN

No	Nama	Indikator Kinerja	2023			2024			Program	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2023	
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%							
1	Terwujudnya Pemertabatan yang Akuntabel dan Berkeadilan	Nilai Akup Peringkat Daerah	A(97,5)	BD (75,72)	86,53%	A(97,5)	BD (75,72)	86,19%	Program Peningkat Uraan Pemertabatan Daerah Kabupaten Kota	4.093.124.438	899.801.696	1.957.419.896	2.884.940.370	3.846.745.413	93,88
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Mencegah Lahan-lahan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Perantau	51	51	100%	15	7	46,66%	Program Penanggulangan Bencana	1.737.362.405	412.093.494	546.325.850	1.905.486.405	1.982.691.297	96,85
		Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madia	5	5	100%	2	0	300,00%							
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	1	1	100%	5	3	60,00%							
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kemataugra Inovasi OPD	100%	41%	41%	100%	89%	89,00%							
Total					85,51%			316,37%		8.838.486.843	1.123.695.190	2.983.744.946	3.998.426,5%	8.329.077.819	94,34

31 Desember 2024  
 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Kabupaten Pesisir Selatan  
  
 ST. SRI M. SST. ST  
 NIP. 1970073199901004